

ISLAM TIONGHOA DI TENGAH POLITIK MULTIKULTURALISME DI KOTA MAKASSAR

Syahrir Karim

UIN Alauddin Makassar, Indonesia
syahrir.karim@uin.alauddin.ac.id

Abstract

This paper examines the position of ethnic Chinese in local politics, especially in Makassar City. Analyzing the relationships and Muslim-majority communities in shaping their political positioning in Makassar City. This paper aims to explain the position of Chinese and Chinese Islam in every moment of democratic contestation as well as the strategic implications of the political position of ethnic Chinese in the midst of the majority in Makassar City. This research was conducted using qualitative methods. The result of this study indicate that Chinese Muslims in Makassar City have multiple identities on the one hand they prioritize their Islamic status and on the other hand they continue to prioritize their Chinese identity. Cultural factors, religion, the process of assimilation in society and changes in the national and local political climate are all influencing factors in seeing Chinese identity.

Keywords: Chinese, Chinese Islam, Multiculturalism, Identity Politics

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang posisi etnis Tionghoa dalam politik lokal khususnya di Kota Makassar. Menganalisis relasi yang terbangun antara etnis Tionghoa, Islam Tionghoa dan masyarakat mayoritas Islam dalam membentuk positioning politik mereka di Kota Makassar. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan posisi Tionghoa dan Islam Tionghoa dalam setiap momen kontestasi demokrasi serta Implikasi strategis posisi politik Etnis Tionghoa di tengah mayoritas di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tionghoa Muslim di Kota Makassar mempunyai identitas ganda, di satu sisi

mengedepankan status keislamannya dan disisi yang lain tetap mengedepankan ke-Tionghoa-annya. Factor kultural, agama, proses asimilasi di dalam masyarakat serta perubahan iklim politik baik nasional maupun local menjadi factor pengaruh dalam melihat identitas ke-Tionghoa-an.

Kata Kunci: Tionghoa, Islam Tionghoa, Multikulturalisme, Identitas Politik

Article History: Received 10 March 2021, Revised: 05 April 2021, Accepted: 30 May 2021, Available online 01 June 2021

Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan beragam etnis suku bangsa. Sebagai negara yang kaya dengan suku bangsa, pluralitas atau perbedaan menjadi sebuah keniscayaan di bumi Indonesia. Ragam etnis tersebut kemudian akhirnya ada yang mengkalsifikasi dalam bentuk pribumi dan non-pribumi. Sebutlah misalnya etnis yang menjadi pribumi seperti Jawa, Minang, Batak, Flores, Bugis, dan lain-lain. Selanjutnya etnis non-pribumi dikategorikan sebagai kelompok pendatang seperti Arab, Tionghoa, dan lain-lain. Diantara etnis non-pribumi tersebut adalah golongan Tionghoa yang mendiami hampir di semua pelosok nusantara ini. Walaupun akhirnya istilah pribumi dan non-pribumi ini semakin menemukan titik kekaburannya. Secara historis, dalam memperkuat eksistensinya sebagai “non-pribumi” ini sejumlah etnis Tionghoa membentuk kelompok sendiri dan mengeluarkan deklarasi yang mereka namakan Piagam Asimilasi di tahun 1961. Dalam piagam tersebut mereka menyatakan tekad penuh untuk menjadi “orang Indonesia yang murni patriotik” seperti disebut pada sumpah pemuda 1928 yakni, untuk mewujudkan satu bangsa, satu tanah air, dan satu Bahasa. Bagi mereka, dalam mewujudkan “orang Indonesia yang murni dan patriotik” orang Tionghoa lokal mesti dilebur ke dalam penduduk asli Indonesia sehingga kaum Tionghoa yang minoritas tidak membentuk kelompok sendiri yang terkesan berjarak dengan penduduk lokal (Yusuf Zaenal Abidin 2016:79–80).

Identitas politik etnis Tionghoa sebenarnya bisa dibagi dalam beberapa fase sejarah, seperti Identitas politik pada fase pra kemerdekaan dan identitas pada pasca-kemerdekaan. Pada fase pra-kemerdekaan meliputi Identitas nasional Tionghoa, identitas etnik Tionghoa serta identitas nasional dalam bentuk pembentukan partai politik (Partai Tionghoa Indonesia). Sedangkan pada fase pasca kemerdekaan meliputi pembentukan identitas etnis, politik, suku (pembentukan organisasi-organisasi etnis), termasuk identitas agama Islam, Budha, Konghucu, dll.

Dalam persepektif sejarah bahwa warga etnis Tionghoa adalah "pendatang". Ini menjadi fakta sejarah dimana orang Tionghoa harus menerimanya sebagai bagian integral dalam keberadaannya di Indonesia (terlepas bahwa fakta tersebut sudah berabad-abad yang lampau). Dalam konteks sekarang warga Tionghoa sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang punya hak hidup dan dilindungi oleh Undang-Undang. Sebagai warga Indonesia yang legal maka secara sosiologis telah melekat segala hak dan kewajibannya yang melekat dalam dirinya serta tentu saja tuduhan sebagai "pendatang" telah berubah.

Perubahan status tersebut dialami setelah era reformasi yang telah diperjuangkan oleh etnis Tionghoa sendiri maupun dari luar etnis mereka. Seiring era reformasi pula sebutan "cina" juga berubah menjadi Tionghoa. Melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, saat pemerintahan B.J. Habibie. Di era ini pula sebutan pribumi dan non-pribumi tidak ada lagi. Perubahan-perubahan ini semua kemudian etnis Tionghoa tidak lagi dipersoalkan secara hukum termasuk segala hal yang berbau diskriminatif. Artinya bahwa persoalan sekarang adalah bagaimana masyarakat melihat status hukum dan status mereka secara sosiologis golongan keturunan Tionghoa di tengah masyarakat Indonesia.

Reformasi kemudian membuka ruang demokrasi seluas-luasnya termasuk etnis Tionghoa untuk turut berpartisipasi secara politik. Ruang demokrasi inilah membawa angin perubahan bagi etnis Tionghoa termasuk memperperjuangkan hak-haknya dan ikut serta dalam kontestasi politik. Panggung politik ini menjadi tempat mereka berjuang, proses artikulasi dan agregasi kepentingan kelompoknya termasuk meluruskan istilah “non-pribumi” yang merugikan etnis mereka selama ini. Era reformasi juga membuat mereka juga sudah kelihatan lebih terbuka dalam hal dukungan dan pilihan politik. Hal ini terlihat dalam setiap perhelatan politik baik nasional maupun local. Di Makassar sendiri pilihan politik tahun 2014 ketika Jokowi-JK berpaket kelihatan sangat didukung oleh mayoritas warga Tionghoa. Di Tingkat politik lokal meskipun kelihatan para elit Tionghoa tersebar diberbagai partai dan dukungan politik tetapi tetap kelihatan solid dalam memperkuat status identitas ke-Tionghoa-an.

Secara umum, etnis Tionghoa masuk di Makassar dan Sulawesi Selatan tidak terlepas atas kedatangan orang-orang Tionghoa di kepulauan Nusantara. Kehadiran etnis Tionghoa khususnya Tionghoa Muslim telah melahirkan dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat yang cukup kompleks. Masa kolonialisme dan imperialisme, etnis Tionghoa menempati posisi kedua sebagai golongan kelas menengah ke atas dari masyarakat pribumi. Sementara di masa Orde Lama mereka diperhadapkan dengan status kewargaan yang dilema. Adapun masa Orde Baru menjadi masa suram bagi kehidupan Tionghoa (Nurhayati and Aksa 2020:95).

Di Makassar sendiri etnis Tionghoa diperkirakan datang sekitar abad ke-15. Mereka rata-rata aktif di sector ekonomi atau perdagangan. Hingga kini keberadaan masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Makassar sudah sangat banyak. Keberadaan mereka diterima secara terbuka oleh masyarakat meskipun mereka punya trauma masa lalau dengan warga lokal yakni saat pengganyakan cina tahun 1998.

Keberadaan mereka yang selama ini dikenal hanya dibidang ekonomi justru mulai bergeser ke wilayah politik.

Seiring dengan gelombang reformasi, etnis Tionghoa kemudian memanfaatkan kebebasan demokrasi dengan mencoba mulai masuk dalam dunia politik praktis melalui partai politik. Dunia yang selama ini sedikit “tabu” bagi mereka khususnya di Kota Makassar. Mereka juga mulai membentuk organisasi berdasarkan keluarga, marga, agama. Beberapa organisasi yang cukup besar dikenal yaitu Pangguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Budi Luhur, Perhimpunan Peranakan Tionghoa Makassar (P2TM), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) serta beberapa organisasi lainnya. Mereka juga tersebar diberbagai partai politik.

Dalam konteks politik, sosok Arwan Tjahyadi dianggap tokoh etnis Tionghoa yang sukses kali pertama menjadi anggota DPRD Kota makassar melalui Partai keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tahun 1999. Langkah Arwan Tjahyadi tersebut telah membuka mata Etnis Tionghoa lainnya, sehingga pada pemilihan legilatif pada pemilu 2014 lalu setidaknya terdapat 7 (tujuh) orang Caleg dari kalangan Tionghoa dan 2 (dua) orang yang berhasil menduduki kursi DPRD Kota Makassar. Berlanjut pada tahun 2019 menempatkan 4 (empat) legislatornya masing-masing 2 (dua) di DPRD Kota serta 2 (dua) di DPRD Provinsi. Maka kemungkinan setiap tahunnya akan terus mengalami peningkatan.

Fenomena ini semakin menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa semakin kelihatan identitas politik mereka. Identitas politik ini tentu lahir dari kesadaran politik etnis Tionghoa terkait bagaimana posisi mereka di antara etnis mayoritas tetap eksis. Ditengah “kesadaran” politik ini kemudian terdapat posisi Tionghoa dan Islam Tionghoa dalam setiap momen kontestasi demokrasi. Tionghoa Islam ini mempunyai

identitas sendiri yang menarik perhatian di tengah mayoritas non-muslim dalam etnis ini. Pola hubungan emosional sesama etnis Tionghoa tidak bisa dilihat di satu sisi termasuk dukungan politik. Keberadaan Tionghoa Muslim ini ditengarai memainkan peran penting dalam konteks relasi dengan masyarakat non-Tionghoa. Status agama ini menjadi penting sebagai jalan untuk meningkatkan interaksi semakin terbuka antar etnis diluar Tionghoa. Islam bisa menjadi faktor antara dalam membangun komunikasi yang lebih harmonis, baik secara sosial kemasyarakatan maupun secara politik. Secara politik hal ini bisa berefek pada ruang ekspresi identitas Tionghoa secara umum dihadapan etnis diluar Tionghoa. Hambatan sosial-politik ini dianggap bisa teratasi ketika terdapat kebuntuan dalam hal hubungan antar etnis. Bagaimanapun, etnis Tionghoa punya masa lalu yang kelam dalam kasus penganiayaan Cina di Makassar tahun 1998. “Cina” secara umum masih punya kesan kurang diterima sepenuhnya oleh “pribumi” dalam banyak hal.

Islam Tionghoa yang hidup di tengah mayoritas masyarakat muslim “pribumi” tampak diterima begitu baik sehingga ini bisa berimplikasi strategis terhadap posisi politik Etnis Tionghoa di tengah mayoritas di Kota Makassar. Terlepas bahwa fenomena ini merupakan bagian dari wajah demokrasi politik multikulturalisme di Indonesia, fenomena ini bisa saja bagian dari upaya untuk mempertegas identitas mereka tidak hanya secara ekonomi tapi juga politik. Hal ini wajar karena bagaimanapun harus diakui bahwa etnis Tionghoa memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dimana dalam politik faktor ekonomi sangat menentukan. Kekuatan ekonomi bisa memunculkan politik patronase, yakni dimana perilaku pemilih salah satunya sangat ditentukan oleh elit-elit yang kuat secara ekonomi.

Fenomena identitas Tionghoa, Islam dalam masyarakat multicultural inilah yang kemudian menarik untuk dikaji lebih jauh termasuk peran politik etnis Tionghoa secara umum di

Kota Makassar. Secara spesifik penelitian akan mengkaji secara mendalam bagaimana etnis Tionghoa membentuk identitasnya dan implikasi secara sosio-politik identitas Etnis Tionghoa ditengah etnis mayoritas di Kota Makassar. Penelitian ini fokus kepada etnis Tionghoa yang bertempat di Kota Makassar. Kajian dengan fokus Tionghoa di Kota Makassar ini menjadi penting dengan beberapa alasan; *pertama*, aksi pengganyangan etnis Tionghoa tahun 1998 merupakan titik penting menilai pergeseran penerimaan etnis diluar Tionghoa di Kota Makassar; *kedua*, tren ketertarikan etnis Tionghoa yang masuk dalam politik praktis terus mengalami peningkatan; *ketiga*, keberadaan Tionghoa Muslim dalam konteks relasi social-politik antar etnis di Kota Makassar yang dinamis.

Tionghoa di Kota Makassar

Masyarakat Sulawesi Selatan secara umum termasuk heterogen. Terdapat beberapa suku, agama, dan bahasa yang beragam. Secara garis besar terdapat empat etnis besar antara lain, Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja serta beberapa sub etnis, seperti Konjo, Duri, dan lain-lain. Sulawesi Selatan sendiri telah mengalami pemekaran wilayah di beberapa kabupaten juga dipecah menjadi dua provinsi yakni, Sulawesi Barat dimana suku Mandar berada disana. Sebaran etnis ini bisa dilihat secara geografis, yakni bugis lebih dominan bagian utara dan etnis Makassar bagian selatan Sulawesi Selatan. Sedangkan etnis Toraja sendiri berada di daerah kab. Tana Toraja serta etnis Duri di Kabupaten Enrekang. Ragam etnis di Sulawesi Selatan ini cukup tersebar di beberapa wilayah. Ragam etnis ini juga seiring dengan keragaman adat-istiadat dengan sistem nilai dan norma masing-masing.

Keragaman ini juga membuat Sulawesi Selatan kaya dengan potensi kearifan lokal yang sangat kaya dengan nilai. Potensi kearifan lokal ini cukup memberi nuansa lokalitas yang terus mendorong komunikasi lintas budaya dan interaksi social sesuai perkembangan zaman. Di Sulawesi Selatan sendiri secara umum Bahasa yang dipakai adalah Makassar, Bugis,

Luwu, Toraja, Mandar, Duri, Konjo dan jenis bahsa lainnya. Adapun agama masih mayoritas beragama Islam, kecuali di Kabupaten Tana Toraja dan sebagian wilayah lainnya beragama Kristen. Sedangkan etnis sendiri terdapat beberapa seperti Makassar, Bugis, Mandar termasuk Tionghoa.

Islam Tionghoa sendiri di Kota Makassar dalam konteks sejarah memeluk Islam sekitar tahun 1600 M. Tercatat yang mula-mula mengajak etnis Tionghoa masuk Islam adalah khatib bernama Abdul Ma'mur atau Datuk Ri Bandang. Ong Tiong Ho alias Abdullah merupakan orang Tionghoa pertama yang masuk Islam. Perantau Tionghoa bernama Wang Jue Sheng pernah menulis bahwa tepatnya di daerah di utara Makassar, dimana yang masih dibawah kekuasaan Hindia Belanda di Asia Tenggara sekarang bernama Makassar disebut sebagai kota luar pada dinasti Ming. Zheng He sendiri pernah berlayar mengunjungi tempat itu dan sempat mengangkat seorang kepala marga setempat menjadi raja. Diceritakan bahwa pada awalnya penduduk disana memeluk agama Budha lalu kemudian beralih memeluk Islam. Meskipun temuan ini masih butuh penelitian lebih lanjut kebenarannya, tetapi setidaknya ini adalah usaha penyebaran Islam yang dilakukan oleh Zheng Ho di Makassar pada masa itu. (Ramli 2015:211).

Khusus etnis Tionghoa, dalam catatan sejarah, bahwa keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia lebih dulu daripada orang-orang Eropa, hal ini ditandai oleh adanya perkampungan Tionghoa dipesisir Utara Jawa seperti Tuban, Demak, dan Jepara pada abad ke-15 (Ricklefs 2005:95). Kemudian tahun ketahun meluas kesegala penjuru di seluruh Indonesia hingga saat ini. Kedatangan bangsa Cina di beberapa negeri di Nusantara terdorong oleh 2 (dua) faktor utama, *pertama*, Cina memang dikenal sebagai bangsa yang suka berniaga. *Kedua* adalah situasi politik di negeri asalnya yang sementara terjadi pergeseran kekuasaan sekitar abad ke-17 dimana mereka terpaksa meninggalkan negerinya. (Leo Suryadinata 1984:31). Pada penelitian yang lain, dua factor

utama diatas dijelaskan lebih jauh. Factor ekonomi, dijelaskan bahwa pada masa dinasti Ming terjadi ledakan penduduk yang luar biasa dan di saat yang bersamaan lahan pertanian tidak lagi memadai untuk menopang kehidupan mereka. Di samping itu juga di saat yang sama pula para tuan-tuan tanah semakin menaikkan pajak tanah yang memaksa mereka meninggalkan kampungnya. Factor kedua terkait politik, dimana sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam peperangan oleh pasukan *Ching* di Formosa. Kemenangan ini kemudian berimbas pada dibukanya jalan dagang Tiongkok dengan Asia Tenggara termasuk jalur Makassar (Bahrum 2016:46).

Hasil penelitian lain terkait karakteristik orang Tionghoa yang suka menyendiri layaknya orang asing yang kelihatan berjarak dengan lingkungan sosialnya. Sebutlah misalnya bagaimana orang Tionghoa cenderung hidup berkelompok, terfokus di kawasan tersendiri. Karakter inilah kemudian banyak beranggapan bahwa orang Tionghoa terkadang diragukan nasionalismenya atau kesetiaannya terhadap Indonesia. Orang Tionghoa masih sering dianggap penuh kepura-puraan terhadap kesetiaannya terhadap negara Indonesia, bahkan lebih ekstrim lagi mereka dianggap hanya mengeruk keuntungan secara ekonomi di hidup di Indonesia. (Coppel 1994:23).

Dalam catatan sejarah yang lain bahwa orang Cina telah hadir di Makassar sejak tahun 1618 (Pradadimara 2014:115). Cina perantauan kemudian terbentuk di Makassar lalu kemudian berbaur dengan kelompok masyarakat yang telah ada sebelumnya. Situasi politik kemudian turut merubah keadaan etnis Tionghoa saat itu terutama ketika VOC berkuasa di tempat ini, masyarakat Cina perantauan kemudian terhubung dalam pola kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah colonial Belanda yang menguasai Makassar. Mulanya bahwa orang-orang Etnis Tionghoa datang di Makassar dan sekitarnya pada masa dinasti Tang pada abad ke-15. Sebagian diantaranya adalah orang Tionghoa yang telah

memeluk Agama Islam (Suryadinata 2002:12). Mereka tiba di Makassar pertama kali bermukim di daerah Kecamatan Butung (Kampung Melayu dan Kampung Wajo). Dalam perkembangannya, kawasan inipun berkembang menjadi Kampung Cina yang berpusat di sekitar Jalan Timor, Jalan Sulawesi, Jalan Sangir, Jalan Lembek, dan Jalan Bali. Bagian Utara berbatasan dengan Kampung Melayu, di Ujung Timur berbatasan dengan kampung kecak, Kampung Arab, Kampung Ende, dan Jalan Irian. Pada sisi Selatan dibatasi oleh Perkampungan Balan Daya (sekitar Jalan Sumba) dan Sebelah barat dengan pelabuhan Makassar yang dibatasi oleh Pasar Sentral (Effendy 2000:215). Di Makassar sendiri terdapat identitas Tionghoa secara simbol seperti Kawasan Pecinan atau *China Town* yang terdapat di jalan Sulawesi. Mereka terkonsentrasi di Kawasan tertentu yang mempertegas identitas ke-Tionghoa-an mereka.

Di Makassar sendiri sejak zaman pra-kemerdekaan, kedatangan Etnis Tionghoa diterima dengan tangan terbuka. Hingga kini keberadaan masyarakat Etnis Tionghoa telah diakui pemerintah daerah. Akan tetapi terlepas dari itu berbagai konflik pasti akan saja muncul. Salah satunya, konflik Etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Dimana Etnis Tionghoa menginginkan dianggap sama tanpa ada perbedaan dan menginginkan keadilan, serta tidak dianggap sebelah mata sebab menurutnya mereka adalah Masyarakat Indonesia juga. Problem ini juga menjadi motivasi kepada mereka bahwa dengan adanya jejak sejarah kelam antara etnis Tionghoa dan masyarakat “pribumi” untuk memperkuat eksistensi mereka sebagai etnis yang sama dengan etnis lainnya. Salah satu caranya adalah meneguhkan keberadaan mereka lewat partai politik termasuk mendekati kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi.

Dalam beberapa generasi orang Indonesia Tionghoa di masa lalu punya sejarah yang kelam baik secara sosial maupun politik. Zaman kolonial Belanda telah membuat system sosial

yang menguntungkan rasnya. Bangsa Eropa ditempatkan di posisi yang tinggi dibanding orang-orang asing dari Asia (Tionghoa) dan penduduk asli (Indonesia) ditempatkan di posisi bawah. Sistem ini dikenal dengan sistem ras tripartite yang sengaja dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pengaturan dengan sistem ini didesain sedemikian rupa lalu mengadudomba mereka dengan cara memisahkan antara orang Tionghoa dari penduduk pribumi. Selanjutnya pribumi Indonesia dibuat sedemikian rupa untuk membenci orang Tionghoa dengan cara diberi hak khusus oleh Belanda termasuk menunjuk Tionghoa sebagai penagih pajak. Oleh sebab itu, meskipun ada orang Tionghoa menjadi kaya raya di suatu tempat tapi dalam perjalanan waktu, mereka tetap hidup dengan berkelompok sesama etnisnya. Hal inilah kemudian oleh pemerintah Belanda dengan sangat gampang menggeser posisi etnis Tionghoa ini karena karakter hidup berkelompok sesuai rasnya yang dianggap rapuh dari dalam. Meskipun pada kenyataannya, karena orang Tionghoa berhasil mengumpulkan modal melalui peran mereka sebagai pemungut pajak dan perantara, orang Belanda bertekad menekan perkembangan kelas menengah di antara kaum Tionghoa dan segala kemungkinan-kemungkinan persekutuan antara orang Tionghoa dan kaum priyayi, bangsawan pribumi. Akibatnya mereka kemudian “memangkas” jumlah orang Tionghoa sesuai kehendak mereka sendiri (Dawis 2010:23).

Selanjutnya salah satu isu menarik terkait Tionghoa di zaman Belanda adalah masalah Pendidikan. Salah satu permasalahan penting yang menjadi pembahasan di kalangan Cina perantauan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah terkait pendidikan bagi anak-anak mereka. Terkait Pendidikan ini memang mengalami masalah tersendiri, di satu pihak pemerintah Belanda hanya memberi kesempatan Pendidikan untuk kalangan mereka sendiri tanpa mengurus di luar ras mereka. Persoalan pendidikan ini tentu menyita perhatian tersendiri karena disinilah titik awal rasa nasionalisme etnis Cina perantauan muncul. Setidaknya factor

penyebab nasionalisme ini muncul karena di satu sisi mereka mereka merasa terusir di negerinya sendiri, dan di sisi yang lain terjadi kolonialisme di tempat di mana mereka merantau. Di antara yang membuat mereka juga merasa solid sesama perantau adalah persoalan Bahasa. Kebudayaan Tionghoa dianggap begitu lestari karena Bahasa nenek moyang mereka masih tersu terjaga. Maka salah satu cara mereka untuk melestarikan bahasa mereka ini adalah dengan membentuk sekolah-sekolah yang diutamakan untuk mengajarkan kebudayaan Cina tersebut. Usaha-usaha dengan jalan Pendidikan ini kemudian terus bergerak maju ketika Jepang menyerah dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, organisasi-organisasi orang Cina kembali berdiri. Organisasi-organisasi ini bermacam-macam latar belakang pendiriannya, ada yang didirikan berdasarkan asal suku, Bahasa, dan ada yang di dasarkan pada marga (Pradadimara 2014:25).

Organisasi inilah kelak yang mendirikan sekolah-sekolah berpengantar Bahasa Cina dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan nenek moyang mereka. Selain didirikan oleh organisasi-organisasi, ada juga sekolah-sekolah yang didirikan oleh gabungan-gabungan pengusaha Cina dari barbagai suku, yang mengumpulkan dana yang kemudian mendirikan sekolah. Tujuannya semua sama yaitu untuk melestarikan kebudayaan nenek moyang mereka yang berasal dari Cina. Selain sekolah Cina yang didirikan oleh organisasi orang Cina, setelah kemerdekaan sekolah *Hollands Chineesche School* kembali berdiri dan dikelola oleh orang Cina peranakan bekerjasama dengan organisasi Cina peranakan di Makassar. Selain menyangkut komponen Pendidikan, kebijakan pemerintah Indonesia turut mempengaruhi Pendidikan terhadap pencarian identitas. Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 februari 1952 melalui Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mendirikan sebuah Unit Kerja untuk mengawasi sekolah Cina tersebut, yaitu inspeksi Pusat Pengajaran Asing. Masa tahun 1957-1958 pemerintah

menerapkan berbagai kebijakan menyangkut sekolah Cina. Semua kebijakan tersebut mengarahkan sekolah Cina menjadi bagian upaya pemerintah Indonesia mengasimilasi orang Cina menjadi bagian dari bangsa Indonesia (Pradadimara 2014:26).

Tionghoa dan Persoalan Identitas

Politik identitas merupakan fenomena yang sering dibincangkan dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagian besar kalangan menganggap bahwa politik identitas ini merupakan penghalang bagi kehidupan berdemokrasi. Beberapa fakta juga semakin menegaskan bahwa politik identitas masih menjadi fenomena yang mewarnai praktik relasi kekuasaan di beberapa daerah. Secara teoritik, politik identitas sendiri merupakan konsep dan gerakan politik dengan kategori utamanya adalah pada perbedaan (*difference*). Ada ruang kebebasan ide dan keterbukaan sebagai sinyal positif untuk merespon semua kepentingan secara utuh (Abdillah 2002:22).

Pola artikulasi kepentingan biasanya memakai politik identitas etnis dengan beragam bentuknya. Hampir semua negara mengalami posisi polemik politik etnis ini. Tidak sedikit negara yang mengalami masalah politik etnis yang terjadi. Di sinilah peran negara mengatur konflik kepentingan identitas- identitas kelompok yang ada. Namun ketika aktor politik melakukan dan menempatkan warga negara ke dalam sekat-sekat etnis, suku dan agama, maka pembentukan negara yang demokratis yang berpijak pada nilai-nilai modern seperti kebebasan, kesetaraan, toleransi dan solidaritas akan mengalami hambatan serius.

Dalam membentuk identitas politik, biasanya sebuah komunitas membentuk organisasi yang senantiasa siap menjadi wadah pemersatu. Organisasi ini menjadi wadah untuk saling mensupport dan berbagi pengalaman antar sesama. Keberadaan organisasi-organisasi etnis ini berefek pada munculnya rasa identitas bersama yang selanjutnya melahirkan perjuangan yang sama. Di antara organisasi tersebut antara lain P2TM (Pesaudaraan Peranakan Tionghoa

Makassar). Organisasi ini merupakan wadah perhimpunan warga Tionghoa di Makassar yang menghimpun semua marga maupun agama dalam etnis Tionghoa. Organisasi ini semacam perhimpunan yang dimaksudkan untuk menyatukan etnis Tionghoa secara umum.

Selanjutnya, di atas Persidaraan Peranakan Tionghoa Makassar (P2TM), juga ada organisasi di atasnya yang memayungi warga Tionghoa secara nasional seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan etnis Tionghoa di Indonesia. Organisasi ini tersebar di beberapa provinsi yang di ketua oleh David Herman. PSMTI merupakan salah satu organisasi masyarakat Tionghoa yang cukup besar dan menjadi organisasi pertama setelah reformasi 1998 yang memperjuangkan masalah-masalah masyarakat Tionghoa Indonesia. Dengan demikian, ada signifikansi yang cukup besar dari organisasi ini terhadap kehidupan kebangsaan secara keseluruhan yang mana tentu saja harus mendapat perhatian pemerintah.

Selain PSMTI ini, juga ada perhimpunan etnis Tionghoa yang bernama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Perhimpunan INTI ini di ketuai langsung oleh Peter Gozal untuk Dewan Pimpinan (DPD) Sulsel. Sedangkan Ketua DPD PSMTI Sulsel oleh Willianto Tanta. Kedua organisasi ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang tidak partisan. Selain itu, juga ada organisasi yang menghimpun secara keagamaan seperti Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) mewakili unsur agama Konghucu. Perhimpunan Majelis Agama Buddha Indonesia (Permabudhi). Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). Keberadaan organisasi ini bagian dari bentuk bahwa warga Tionghoa memiliki ragam agama yang berbeda.

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) misalnya adalah merupakan sebuah organisasi yang anggotanya terdiri atas kalangan muslim keturunan Tionghoa. PITI merupakan gabungan antara Persatuan Islam Tionghoa (PIT) dan

Persatuan Tionghoa Muslim (PTM). PIT didirikan di Medan pada tahun 1935 oleh Liem Kie Tjie alias Abdoel Rasjid dan Mao Tse Fang alias Nurdin. PIT segera mengembangkan sayap ke Padang, Jakarta, Makassar, Madura, dan Banjarmasin. Jumlah anggotanya pada tahun 1942 sekitar 43.000 orang. Baru tiga puluh tahun kemudian PITI lahir (Zein 2000:94). PITI pertama kali didirikan secara resmi pada tanggal 14 Juli 1961. Kegiatan prioritasnya adalah dakwah dan Syiar Islam. Dalam perkembangannya, saat Orde Baru berkuasa nama organisasi ini menjadi Persatuan Iman Tauhid Indonesia, pernah juga berubah nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Saat ini PITI telah berkembang ke beberapa daerah di Indonesia diantaranya di Kab. Gowa dan Kota Makassar.

Kesadaran politik warga Tionghoa merupakan bagian terwujudnya ragam identitas politik di Indonesia. Demokrasi deliberatif yang dianut Indonesia telah memberi ruang yang luas bagi kelompok-kelompok politik baru dalam mengartikulasikan kepentingan mereka termasuk identitas politik Tionghoa. Sehingga teori politik identitas dan multikulturalisme ini dianggap sangat relevan dalam melihat dan menganalisis bagaimana ruang politik etnis Tionghoa khususnya di Kota Makassar.

Dalam diskursus teori politik, politik multikulturalisme juga dikenal sebagai politik pengakuan. Seperti halnya liberalisme, politik pengakuan terfokus pada pentingnya hak atas penghargaan yang sama dalam pemaknaan hidup yang baik dalam membentuk identitas manusia serta tuntutan kesetaraan budaya. Termasuk dalam hal ini politik pengakuan adalah mempromosikan dan mengakui kekhasan model budaya dan tradisi yang ada (Paskarina 2016:174).

Secara umum bahwa multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan posisi yang sama dengan kebudayaan lainnya. Oleh karenanya semua kebudayaan berhak mendapatkan tempat yang sama seperti kebudayaan yang lain. Multikulturalisme sendiri dianggap

sekelompok manusia dimana mereka menciptakan kulturenya sendiri sebagai ciri khasnya. Pemahaman multikulturalisme bersikap dengan kebudayaan yang beragam secara permanen hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Multikulturalisme mengajak untuk sama-sama belajar serta memahami budaya lainnya agar terdorong rasa empatik. Multikulturalisme mengimplikasikan suatu keharusan untuk mengapresiasi kebudayaan-kebudayaan lain secara positif. (Baidhawy 2001:5).

Cita-cita dasar politik multikulturalisme dilihat dari pembahasan di atas adalah pentingnya mewujudkan sebuah sistem social yang damai, setara dan tidak rasial. Hal ini baru kemudian terwujud ketika masyarakat bisa saling menerima dan menerima perbedaan tanpa harus memakai label normatif masing-masing. Politik multikulturalisme dipahami sebagai politik yang mencoba menerjemahkan substansi multikulturalitas social ke dalam tatanan dan kondisi politik institusional. Politik multikulturalisme sangat penting untuk diaktualisasikan dalam sebuah masyarakat modern. Hal ini dikarenakan identitas kelompok butuh kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak mereka di luar sana. Dalam konteks politik etnik Tionghoa, jaminan dan dukungan politik negara merupakan suatu keniscayaan. Salah satu cara dalam mempertahankan identitas politik mereka adalah dengan memanfaatkan momentum era reformasi untuk berpartisipasi secara politik. Disisi yang lain bahwa keterlibatan politik etnis Tionghoa memang tidak bisa dipungkiri karena jejak sejarah yang terus mengalami diskriminasi rasial di negeri ini.

Etnis Tionghoa dan Politik di Kota Makassar

Identitas etnis Tionghoa diakui baru mengalami keterbukaan secara penuh ke public sejak era reformasi. Keterlibatan warga Tionghoa merupakan wujud kebijakan pemerintah dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyatnya untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Pada

kepemimpinan B.J.Habibi, lahir instruksi untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 26 tahun 1998. Penghentian ini istilah ini bertujuan untuk tidak lagi membedakan antara etnis berketurunan “cina” dan penduduk asli (pribumi Indonesia). Perbedaan yang ada cukup pada wilayah etnisitas sebagai bagian dari keberagaman, etnis Makassar, Bugis, Batak, Jawa, Sunda, Cina, Arab, dan seterusnya. Hal ini dibenarkan secara hukum dan secara sosiologis etnis keturunan ‘Tionghoa’ ini di tengah masyarakat Indonesia jangan lagi dipermasalahkan statusnya. Kebijakan pemerintah inipun turut berimplikasi secara politik kepada etnis Tionghoa baik secara nasional maupun local. Geliat politik etnis Tionghoa mulai tumbuh di hampir semua daerah.

Dalam konteks sejarah, sebenarnya keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik termasuk dalam partai politik tidaklah baru. Sebutlah misalnya ketika dalam catatan sejarah pernah ada Partai Tionghoa Islam Indonesia (PTII). Pada abad ke-20, komunitas Muslim Tionghoa Makassar membentuk organisasi. Berawal dari maraknya pergerakan nasional pada waktu lalu kemudian tersebar ke sebagian nuasantara termasuk makassar. Beberapa tokoh pergerakan nasional kemudian datang ke Makassar. Keberadaan PTII ini kemudian menginspirasi munculnya PITI pada tanggal Mei 1961 yang sampai sekarang masih eksis. Meskipun dalam perjalannya mengalami banyak tantangan yang pada akhirnya PTII bubar dengan sendirinya dan PITI tetap berdiri sampai sekarang. Keberadaan PITI tetap punya daya Tarik tersendiri dalam setiap kontestasi demokrasi di Kota Makassar.

Dinamika politik di kota Makassar terlihat sangat terbuka dan dinamis. Pemilu 2019 misalnya menggambarkan bagaimana semua komponen bangsa dari berbagai agama bahkan etnis saling berbaur dan berkontestasi dalam memperebutkan kekuasaan politik khususnya di legislative bahkan eksekutif. Sebutlah misalnya di jajaran perebutan

kursi eksekutif (2014) terlihat etnis Tionghoa bernama Ahao maju dalam kontetasi pilwali di Kota Makassar. Terlihat pula dalam perebutan kursi legislatif, pula disemarakkan dengan majunya beberapa tokoh Tionghoa. Mereka tersebar di beberapa partai poltik dan dan daerah pemilihan. Pilihan di level parlemenpun terbagi dari daerah sampai ke pusat. Pada level DPR RI terlihat antara lain ada Raymond Arfandi melalui kendaraan Partai Nasdem dari daerah pemilihan Sulsel I. Di partai politik ada Kristoforus Essay di partai Perindo dan di PDIP ada Irwan Sutanto. Mereka berada di Daerah pemilihan yang terdiri 6 (enam) daerah yakni Kota Makassar, Bantaeng, Takalar, Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Selayar. Sedangkan di DPRD Sulsel ada James Kairupan di daerah pemilihan Sulsel II melalui Partai Hanura. Edwar Horas sebagai incumbent ada di Daerah Pemilihan Makassar lewat Partai Gerindra. Termasuk dipemilihan legislatif 2019 terdapat 7 (tujuh) caleg dari etnis Tionghoa, baik di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota.

Terkhusus kontestasi Caleg DPRD di Kota Makassar justru terlihat lebih banyak dan tersebar di hampir semua daerah pemilihan (Dapil). Di Daerah Pemilihan I misalnya terdapat Erick Horas dar partai Gerindra, Romi Arfandi Tandiar (Hanura), Alfon Romio Limbunan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Yohana Massie dari PDIP. Selanjutnya di Daerah Pemilihan II ada nama Hendryk Hodiono (Partai Demokrat), Melani Simon (Nasdem) dan selanjutnya William Laurin (PDIP). Di Daerah Pemilihan III ada Ariella Hana Sinjaya di Daerah Pemilihan V (Nasdem) dan Adi Mulyadi (PAN). Di Kota Makassar pada pemilu 2014 lalu setidaknya terdapat 7 orang Caleg dari kalangan Tionghoa. Satu etnis, namun berbeda Partai. Arwan Tjahjadi dan Melani Simon (Partai Nasdem), William Laurin (PDIP), Eric Horas dan Edward Wijaya Horas (Partai Gerindra), Herman Sinarli (Partai Hanura), Tjiko Wihara (Partai Keadilan Persatuan Indonesia). Akan tetapi dari 7 orang caleg hanya 2 orang yang berhasil duduk di DPRD Kota Makassar, yaitu William Laurin

dan Eric Horas. Berlanjut pada tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) caleg Tionghoa baik yang bertarung di DPR RI, Provinsi dan Kota. Namun hanya 4 (empat) yang lolos di kursi legislative yakni masing-masing 2 (dua) di DPRD Kota dan 2 (dua) di DPRD Provinsi.

Tabel 1. Caleg Tionghoa Prov. & Kota Makassar yang lolos 2019

No.	Nama	Partai	Dapil	DPRD
1.	Andre Prasetya Tanta	Nasdem	Makassar A	Provinsi
2.	Edwar Wijaya Horas	Gerindra	Makassar A	Provinsi
3.	William Laurin	PDIP	2	Kota Makassar
4.	Erick horas	Gerindra	1	Kota Makassar

Sumber: KPU Sulsel

Data tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa warga Tionghoa terlibat dalam politik sebagai wujud bahwa mereka bagian dari warga Indonesia dari latar belakang etnis Tionghoa. Keterlibatan mereka secara politik juga memberi pesan bahwa butuh pengakuan sebagai etnis yang eksis dan layak mendapatkan kedudukan yang sama dengan etnsi lainnya. Keterpilihan mereka ini membuat mereka berada diposisi mewakili masyarakat tidak hanya dikalangan Tionghoa. Keterpilihan mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan daerah pemilihan yang mereka wakili tanpa harus mementingkan golongan dan kelompoknya sebagai wakil rakyat.

Dua legislator etnis Tionghoa Kota Makassar di atas merupakan tokoh Tionghoa yang eksis di profesi masing-

masing. William Laurin sendiri dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dan sekaligus pengurus aktif di lembaga kepemudaan, seperti Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Sulsel. William Laurin berada di Dapil II Makassar, Kecamatan Wajo, Tallo, Bontoala dan Ujung tanah. Sedangkan Eric Horas adalah Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra di Kota Makassar. Eric juga adalah sosok pengusaha sukses Rumah Makan dan beberapa kafe di Kota Makassar. Eric Horas sendiri mewakili Dapil I Makassar, Kecamatan Rappocini, Makassar dan Ujung pandang. Dapil I dan Dapil II sangat beragam berdasarkan latar etnis masyarakatnya sehingga ini menjadi fenomena tersendiri yang butuh kajian lebih jauh.

Keberadaan etnis Tionghoa dalam politik Indonesia semakin mempertegas bahwa identitas politik etnis Tionghoa semakin nampak. Keberadaan mereka adalah bukti bahwa mereka ikut dalam proses politik yang pada akhirnya akan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Ini pertanda bahwa mereka yang selama ini dikenal hanya dikenal sebagai pelaku ekonomi sudah tidak relevan lagi. Meskipun pada akhirnya tidak semua di antara mereka yang mencalonkan terpilih. Dalam hal ini, yang terpilih hanya empat orang, dua di DPRD Sulsel dan dua di DPRD Kota Makassar. Meskipun demikian, bahwa keterpilihan mereka adalah bukti bahwa mereka dipilih tidak hanya di kalangan pemilih etnis Tionghoa tetapi juga di luar etnis mereka.

Keterpilihan mereka di beberapa level di parlemen serta sebaran daerah pemilihan yang cukup beragam menjadi tanda bahwa politisi dari etnis Tionghoa terbukti bisa diterima oleh masyarakat. Terlebih lagi ada yang terpilih sampai 3 (tiga) periode berturut-turut, seperti bapak Eric Horas dari partai Gerindra. Beberapa politisi etnis Tionghoa pun merasa penting untuk menjelaskan lebih jauh peran dan fungsi mereka dalam jabatannya sebagai wakil rakyat. Hal ini menjadi penting

karena sangat terkait dengan *political interest* bagi seorang aktor politik. Dalam konteks ini relevan dikemukakan pendapat Blair King dalam uraian Pahlevi, terdapat kepentingan dan peran di wilayah lembaga perwakilan yaitu interes bersifat personal ekonomi, interes dari partai-partai politik serta interes yang dipengaruhi oleh kepentingan konstituen (Pahlevi 2015:38). Berkenaan dengan hal tersebut, anggota legislatif Tionghoa dari fraksi Gerindra, Eric Horas, mengkonfirmasi bahwa tidak ada peran politik yang bersifat sektarian ataupun yang sifatnya etnisitas:

“Pertama-tama saya bersyukur keturunan Tionghoa sudah semakin banyak mau terlibat dalam Dunia politik tentu dikarenakan rasa Nasionalisme yg begitu tinggi dan tentu tidak terlepas pengabdian kepada Negara salah satunya tempat kami menyalurkannya, di sisi lain tentu memperjuangkan aspirasi Masyarakat baik dari semua kalangan bukan saja dari kelompok atau dari organisasi etnis tertentu jadi saya pikir tidak ada faktor lain” (Eric Horas, wawancara, April 2021).

Keterangan informan di atas menjadi menarik ketika kecenderungan warga Tionghoa masuk ke dua politik praktis lebih kepada unsur nasionalisme. Yakni, sebuah rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia untuk terus mengabdikan dan menjadi warga negara yang baik. Pernyataan ini juga menjadi indikator tidak ada lagi sekat antar etnis. Lewat pernyataan ini juga menjadi sinyal pentingnya berdiri di atas semua golongan ketika menyandang status anggota dewan. Nasionalisme seperti yang dikatakan oleh politisi Tionghoa di atas sejalan dengan Max Weber sebagai “tipe ideal”, yakni sebuah ideologi yang daya dorongnya efektifnya adalah rasa memiliki dan melayani suatu komunitas nasional. Secara khusus pengikut ideologi ini mencoba menginternaslisasi identitas budaya yang khas terhadap bangsa mereka yang menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lain serta menempatkan posisi istimewa dalam proses sejarahnya. Sentiment yang terbawa oleh perasaan yang sebelumnya menjadi bagian dalam komunitas ini itu dapat dibatasi dengan

perasaan bangga yang besar terhadap kebudayaan dan tradisi nasional tanpa dikaitkan dengan tuntutan politik apapun (“nasionalisme kultural”) (Eatwell and Wright 2004:212). Weber dalam hal ini menekankan bagaimana nasionalisme ini kemudian menjadi titik temu antar budaya tanpa menjadi nasionalisme kultural karena tuntutan politik tertentu. Hal ini menarik karena konsep nasionalisme yang ditawarkan oleh Weber di atas selaras dengan Bahasa nasionalisme oleh politisi dari etnis Tionghoa sebelumnya.

Dalam konteks nasionalisme kultural ini, kelihatan menjadi ruang dialog antar etnis bahkan antara ornanisasi-organisasi di internal Tionghoa. Termasuk bagaimana organisasi masyarakat berbasis etnis Tionghoa seperti PSMTI maupun organisasi keagamaan Tionghoa (PITI) dan lain-lainnya bisa menjadi bangunan kuat dalam meneguhkan rasa nasionalisme. Peran anggota legislatif Tionghoa juga harus menunjukkan peran dan partisipasi politiknya yang tidak dimaksudkan untuk sekedar merebut kekuasaan, seperti halnya di bidang ekonomi, dan kepentingan kelompoknya akan tetapi lebih kepada kehendak keterwakilan dalam pemerintahan atau kekuasaan. Hal ini penting karena mereka sudah beralih status sebagai wakil rakyat bukan wakil dari golongan tertentu. Dalam hal ini Laswell dan Kaplan, mengatakan bahwa aktor politik akan sangat bergantung pada sumber daya politik yang tersedia. Maka untuk memperoleh kekuasaan politik, baik dalam arti kapatuhan, pengaruh, maupun otoritas, aktor politik perlu memperluas dan mendayagunakan persediaan sumber daya secara efektif (Said 2007:111–13).

Sejalan dengan ini, memang diakui bahwa melenggangnya etnis Tionghoa menjadi anggota legislatif tentu tidak terlepas dengan sumber daya yang mereka miliki terutama secara ekonomi. Michael Rush dan Philip Althoff dalam menanggapi pola keterlibatan poliitk etnis Tionghoa ini sebagai bentuk hierarki politik. Partisipasi yang dibahasakan oleh Rush dan

Althoff ini berada di beberapa kategori seperti menduduki jabatan politik dan administratif, menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi baik politik maupun yang semi politik, menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik, dan seterusnya (Maran 2007:148). Kategorisasi bentuk partisipasi politik oleh Rush dan Althoff ini sangat relevan dengan bentuk partisipasi beberapa warga Tionghoa baik partai politik maupun di organisasi internal maupun di eksternal mereka seperti disebutkan dipembahasan di atas. Dukungan dari warga Tionghoa terutama yang berafiliasi dalam organisasi Kota Makassar seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) dan organisasi agama, lintas iman, dan termasuk kedekatan mereka dengan organisasi Islam Tionghoa menjadi salah satu faktor yang potensial untuk dalam karir politik etnis Tionghoa Tionghoa.

Geliat Politik Multikulturalisme

Terbukanya ruang partisipasi publik termasuk ruang-ruang politik bagi semua warga negara merupakan bentuk artikulasi politik. Proses artikulasi ini menjadi ruang dimana identitas sosial dan kelompok bisa terbawa sampai pada tingkat kebijakan. Fakta politik Kota Makassar ternyata memperlihatkan fenomena di mana identitas-identitas baru cukup menyita perhatian. Etnis Tionghoa misalnya telah membuka ruang baru itu dengan memanfaatkan momentum politik sebagai media artikulasi kepentingan dan membangun identitas sosialnya. Secara umum bahwa Kota Makassar relatif terbuka bagi semua aktor politik yang memiliki identitas etnis beragam, baik yang berlatar etnis Bugis, Makassar, termasuk etnis Tionghoa itu sendiri.

Data dari pembahasan sebelumnya memperlihatkan bagaimana sebaran dapil masing-masing caleg terpilih dari etnis Tionghoa tidak hanya di kalangan etnis Tionghoa tapi juga di berbagai ragam etnis. Hal ini menandakan bahwa keterpilihan mereka tidak lagi berbicara persoalan etnisitas tapi multikulturalisme. Politik multikulturalisme ini sangat relevan

dalam konteks Indonesia karena letak geografis. Letak Indonesia yang strategis mengundang berbagai suku bangsa datang ke Indonesia, untuk kepentingan perdagangan, seperti bangsa China, Arab, India, Amerika dll. Tidak hanya itu, Indonesia juga diminati oleh negara-negara penjajah karena posisinya dan sumberdaya alamnya. Dalam hal penyebaran agama juga Indonesia juga tak kalah menariknya untuk melihat dinamika penyebaran agama di masa-masa awal, baik agama Kristen, Islam dan lain-lain.

Terbentuknya masyarakat multikultural di atas menegaskan bahwa keragaman baik etnis, budaya, agama, ras dan lain-lain menjadi keniscayaan. Factor-faktor yang membentuk masyarakat multicultural di atas menjadi hal yang lumrah dan telah terjadi di Indonesia sejak dari dulu. Sehingga menjadi kewajiban ketika proses pengambilan kebijakan tidak lagi berbasis kelompok, agama, atau etnis tertentu. Kebijakan harus dirumuskan dari bawah yang bersifat *bottom up* bukan *top down*.

Kesadaran akan identitas politik ini juga dikemukakan oleh anggota legislatif Tionghoa dari fraksi Gerindra, Eric Horas, menyatakan bahwa fungsi anggota legislatif tidak terlepas dari unsur kelompok atau etnis:

“saya sudah 3 (tiga) periode di DPRD makassar sampai saat ini yg saya rasakan dan melihat begitu besar rasa kekeluargaan kita ketika bertatap muka maupun bersilahturami bersama seluruh elemen masyarakat dan kita sudah tidak sungkan lagi baik itu di dalam bermusyawarah sesuatu hal , saya Kira jaman sudah berubah dan masyarakat kita sudah saling menghargai antara suku dan budaya yg ada di kota makassar sehingga tidak ada lagi sekat antara sesama”. (Eric Horas, wawancara, April 2021).

Pengalaman sebagai anggota Dewan selama 3 (tiga) periode menjadi penting dari bapak Eric Horas bahwa kedekatan ke etnis tertentu tidak menjadi kendala untuk dalam melayani masyarakat secara umum. Penerimaan

masyarakat Kota Makassar sudah begitu terbuka dan tidak lagi berbasis etnis. Hal ini tidaklah berarti fungsi anggota legislatif di DPRD hanya untuk memenuhi kepentingan etnis atau warganya sendiri sebab anggota legislatif harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum.

Keberadaan status anggota legislatif dari etnis Tionghoa tetap menyadari identitas etnisnya berbeda dengan etnis anggota legislaif atau masyarakat lainnya, namun identitas etnis tersebut cenderung diasimilasi dalam interaksi sosial politik. Hal ini juga bisa disebut bahwa anggota legislatif Tionghoa melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama atau menyesuaikan kepentingannya dengan kepentingan kelompok dan etnis lainnya. Itulah sebabnya anggota legislatif Tionghoa berupaya membaur dalam interaksi sosial politik ditengah keragaman etnis anggota legislatif, anggota parpol maupun ditengah masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari informan tersebut di atas, diindikasikan bahwa politik identitas etnis dari anggota legislatif Tionghoa itu berlangsung dalam tataran interkasi sosial politik, baik ketika berelasi dengan anggota legislatif lain maupun saat menjalin hubungan dengan masyarakat yang berbeda etnis. Lebi lanjut Eric Horas menyampaikan ketika menanggapi masih adanya sentiment etnis Tionghoa di tegah masyarakat:

“saya pikir ini hanya segelintir orang serta faktor edukasi atau mungkin Maindset yg belum terbuka secara nasionalis, terbuka untuk semua kalangan bukan saja dari kelompok atau dari organisasi etnis tertentu. Masyarakat secara umum sudah sangat terbuka dan terbiasa untuk saling menghargai antara satu sama lain termasuk suku dan budaya” (Eric Horas, wawancara, April 2021.

Tionghoa khususnya dalam tataran interaksi sosial politik, bermakna positif karena tidak mengedepankan sikap

etnosentrisme atau membatasi diri dalam sekat primordial. Politik identitas etnis dari anggota legislatif Tionghoa semakin dengan apa yang diungkapkan oleh Abdillah, bahwa politik identitas sebagai keinginan individu untuk memiliki identitas sosial yang positif dan sebagai motor psikologis penting dibalik tindakan-tindakan individu dalam setiap interaksi sosial (Abdillah 2002:22).

Keasingan orang Tionghoa di Makassar sendiri masih kelihatan terasa khususnya dalam konteks interaksi sosial. Pemakaian bahasa serta terbukanya sekolah-sekolah yang dominan Tionghoa bahkan koran yang berhasa Tionghoa semakin memperkuat posisi mereka yang kelihatan “asing”. Di toko-toko pemilik etnis Tionghoa masih terasa bagaimana bahasa leluhur mereka begitu terjaga ketika mereka berdialog dengan sesamanya. Sehingga dari sini juga membuat mereka semakin sadar dengan ke-Tionghoa-annya. Sehingga hal kemudian berimplikasi terhadap kesan orang di luar etnis mereka bahwa Tionghoa Indonesia masih selalu dianggap oleh orang Indonesia sebagai orang Tionghoa (Faraidiany n.d.:81).

Fenomena di atas merupakan hal yang lumrah ketika “minoritas” berada di antara mayoritas. Penerimaan terkait identitas butuh proses yang panjang dengan berbagai usaha keras. Meskipun dalam konteks sejarah mengatakan bahwa keberadaan mereka di Kota Makassar sangat diterima bahkan tidak pernah ada konflik etnis. Baru kemudian terjadi konflik itu justru di tahun 1998 di mana etnis Tionghoa mengalami kekerasan rasial oleh etnis “pribumi”. Inilah kemudian kenapa etnis Tionghoa berusaha semaksimal mungkin agar membangun cara agar keberadaan mereka tetap terjaga dan terbangun harmoni antar sesama etnis, dan salah satu jalannya adalah mempertegas identitas mereka baik secara sosial, politik maupun keagamaan.

Islam Tionghoa dan posisi Strategis Politik Etnis Tionghoa

Ketika presiden Abdurrahman Wahid menjadi presiden telah memberi ruang cukup baik dalam membangun hubungan antar etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keputusan presiden no. 6 tahun 2000 terkait kebebasan merayakan tahun baru imlek bagi warga Tionghoa. Hal ini terkait masih adanya persoalan antara hubungan antara etnis khususnya Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Persoalan yang sering muncul terkait misalnya system social, politik, keadilan dan kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara. Hubungan warga keturunan Tionghoa dengan masyarakat local masih sering muncul ketegangan, hak politik warga dan seterusnya. Di tengah persoalan ini, ada sisi lain di mana warga Tionghoa yang beragama Islam relatif punya kedekatan dengan oleh masyarakat pribumi. Kedekatan secara kultural dan keagamaan ini membuat mereka lebih diterima karena diikat dengan rasa persaudaraan seiman. Hal inilah yang kemudian dianggap mampu menghilangkan kesenjangan social dan kecurigaan karena perbedaan warna kulit semakin berkurang.

Di Kota Makassar sendiri ada sekitar 1.000 orang Tionghoa muslim yang terdata di PITI Sul-Sel di luar yang masih belum terdata. Tionghoa muslim di Kota Makassar rata-rata bukan karena kesamaan asal-usul, tetapi lebih ke factor Pernikahan, keturunan, pergaulan, panggilan hati (hidayah) dan studi atau pengkajian (Ramli 2015:212). Terlepas dari itu, bahwa kedekatan leluhur mereka yang banyak memeluk Islam serta alasan, bahwa Indonesia mayoritas Islam yang membuat mereka gampang berinteraksi adalah factor lain yang membuat mereka tertarik masuk Islam.

Fenomena Islam Tionghoa di Kota Makassar mengalami hal yang sama. Hal ini juga terlihat bagaimana proses asimilasi yang terbangun selama ini antara Tionghoa muslim dan muslim pribumi terus terjadi. Seperti yang dikatakan oleh bapak Kwan John Adam Fu Ming, atau akrab di panggil John Adam ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI):

“Islam Tionghoa mampu berbaur dengan masyarakat lokal muslim lebih erat lagi. Ada perasaan saudara seagama yang jauh lebih dalam sehingga tercipta hubungan yang baik dan saling menerima. Di sisi yang lain, identitas ke-Tionghoa-an sayapun tetap tegus tidak bergeser. Eksistensi sy sbg org tionghoa tdk merasa bergeser dan masih terus dirasakan. Di dalam komunitas Tionghoa pun kami tetap dihargai dan dihormati. Kami dianggap sebagai saudara setionghoa dan yang seagama sebagai saudara seagama. Bahkan sering dilibatkan dalam acara-acara sosial yang menyangkut agama malah melibatkan kami, mereka bikin acara buka puasa baksos dan kegiatan-kegiatan social lainnya” (John Adam, wawancara, April 2021).

Status agama dalam lingkungan Tionghoa sendiri tidak begitu berpengaruh dalam membangun interaksi sesama warga Tionghoa. Sehingga eksistensi mereka sebagai Tionghoa tidak membangun jarak yang begitu jauh hanya karena persoalan status agama. Hal ini juga ditegaskan oleh tokoh pemuda Tionghoa atas nama Erfan, sekaligus Ketua Pemuda Khonghucu Sulawesi selatan:

“Hubungan warga Tionghoa dengan sesamanya dihimpun oleh sebuah organisasi Tionghoa secara umum. Se jauh ini masih sangat baik dan terus terjalin dan intens mengadakan pertemuan. Selain itu, juga aktif di kegiatan-kegiatan di lintas iman di Kota Makassar sehingga ini menjadi jembatan untuk membangun komunikasi yang lebih baik lagi utamanya teman Tionghoa dan masyarakat umum lain” (Erfan, wawancara, Juni 2019).

Pernyataan kedua informan di atas menunjukkan secara umum bagaimana fenomena agama dan etnisitas di internal Tionghoa di Kota Makassar. Hubungan dan eksistensi ke-Tiongho-an tidak begitu terpengaruh baik secara emosional maupun kultural di antara mereka. Fenomena ini juga bukan berarti bahwa secara totalitas mereka solid diurusan politik. Dalam urusan politik ternyata warga Tionghoa punya pilihan atau afiliasi yang beragam. Islam Tionghoa misalnya dalam hal ini Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) punya prinsip

sendiri dalam hal pilihan politik. Ketua PITI Kota Makassar Bapak John Adam memberi komentar:

“Warga Tionghoa punya hak untuk mencalonkan diri dengan hak politik yang mereka miliki. Silahkan mereka berpolitik sepanjang kemampuan atau kapabilitas dan bagus kami akan dukung, kamipun tidak dalam hal ini meakukan gerakan dukung-mendukung siapapun. Dukungan bisa saja di luar etnis Tionghoa kalau diaanggap di luar dari kriteria ideal kami. Meskipun terkadang ada juga kecenderunga para caleg meminta dukungan ke Islam. Tionghoa. Mereka melihat kami sebagai jembatan ke masyarakat pribumi, tapi sekali lagi jangan bawa-bawa kami masuk ke politik atas nama agama. Kami juga tidak ada deal-deal politik tertentu atau tawar menawar politik, kami sangat tidak menerima itu. Kalau ada semacam janji-janji politik adri mereka terkadang saya diamkan saja. Jadi silahkan mereka maju sambil melihat perkembangan tapi sekali lagi tidak ada deal politik tertentu dengan mereka secara khusus” (John Adam, wawancara, April 2021).

Kecenderungan politisi Tionghoa dalam mendekati Islam Tionghoa memang hal yang wajar. Hal ini bisa saja menjadi startegi politik untuk merau suara tentunya. Disadari atau tidak, bahwa merebut pemilih di luar etnis mereka adalah satu keharusan karena keterbatasan dan polarisasi politik di internal mereka sendiri. Apalagi dengan majunya beberapa caleg dari etnis Tionghoa memaksa mereka untuk membangun strategi baik daerah pemilihan maupun konstituen. Strategi untuk mendekati Islam dengan jalur PITI juga bukanlah satu-satunya, ternyata komunitas Islam yang lain yang punya pengaruh juga tak luput untuk didekati, seperti dalam wawancara dengan ketua PITI bapak John Adam:

“PITI memang dikauai punya kemampuan komunkasi dan kedekatan ke masyarakat pribumi. Tetapi bukan Islam Tionghoa yang tergabung di PITI bukanlah satu-satunya komunitas atau ormas Islam yang didekati khususnya oleh tokoh-tokoh politik Tionghoa. Nampak bahwa banyak tokoh-tokoh Tionghoa membangun komunikasi dengan tokoh agama islam, termasuk para Habaib. Jadi PITI

bukanlah satu-satunya alat jembatan komunikasi ke Islam pribumi, tapi juga ke ormas Islam lain” (John Adam, wawancara, April 2021).

Nampak dari pernyataan informan di atas bahwa para politisi Tionghoa terbilang cukup berat kalau dilihat dari segi komunitas massa yang dimiliki. Mendekati kelompok Islam termasuk di PITI adalah bagian yang harus dilakukan. Akan tetapi kedekatan dengan umat Islam juga belum menjadi jaminan sehingga potensi kekuatan lain pun sebenarnya tetap terbuka. Keterlibatan etnis Tionghoa bukanlah hal yang baru sehingga segala tantangan politik yang disebutkan sebelumnya bukanlah menjadi halangan yang membuat mereka tidak berpolitik. Dengan berbagai sumber daya dan kekuatan politik yang dimiliki termasuk dalam ekonomi lokal dan jaringan bisnis dan koneksi internasional, mereka seharusnya dapat dengan mudah menjadi pemain utama di arena politik. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep Bourdieu (tentang modal atau sumber daya politik) bahwa dalam konteks politik, seseorang yang memiliki modal politik maka mereka akan dengan sendirinya berperan aktif dalam arena politik untuk mendapatkan sumber-sumber kekuasaan dalam politik, baik itu kedudukan atau jabatan, ataupun kewenangan yang dimiliki (Ritzer & Goodman, 2012:524). Dengan kata lain, tidaklah mudah bagi seorang politisi Tionghoa untuk mempertahankan posisinya (*status quo*) di arena politik terutama jabatan struktural di pemerintahan semisal legislatif dan eksekutif, sebab mereka juga diperhadapkan dengan berbagai hambatan. Salah satu hambatan misalnya diungkapkan oleh Maghfira dalam kajiannya, bahwa hegemoni negara maupun dominasi yang kuat antara etnis mayoritas atas Etnis minoritas, menyebabkan etnis Tionghoa di posisi minoritas akan selalu diperhadapkan pada situasi-situasi sulit yang dapat mempengaruhi eksistensinya sebagai sebuah etnis (Faraidiany n.d.:75). Dengan demikian penting untuk menganalisis bagaimana sesungguhnya para anggota legislatif Tionghoa mempertahankan eksistensi dan posisi politiknya

diarena politik lokal, dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang melingkupinya. Walaupun demikian, bahwa yang pasti keterlibatan mereka dalam politik ada keinginan dan perjuangan bersama terkait sejarah kelam diskriminasi rasial untuk tidak terulang kembali.

Implikasi yang sebenarnya dari posisi politik Tionghoa adalah bagaimana Muslim Tionghoa ini membawa sebuah kesadaran bahwa masalah pembauran sebenarnya tidak cukup dengan masalah hubungan secara horizontal, yakni hubungan antara orang tionghoa dan non-Tionghoa, akan tetapi lebih dari itu. Hubungan vertikal juga menjadi penting, yakni hubungan antara orang Tionghoa dan Pemerintah atau para pengambil kebijakan. Inilah yang kemudian bisa menjadi titik pendorong kenapa orang-orang Tionghoa masuk dalam dunia politik praktis agar bisa membangun komunikasi secara utuh sekaligus menjadi proses artikulasi kepentingan khususnya bagi warga Tionghoa secara umum. Implikasi lebih jauh adalah keterlibatan mereka dalam politik praktis sekaligus memperkuat jati dirinya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak yang sama dengan warga negara yang lain dalam hal berbangsa dan bernegara. sebutlah misalnya bagaimana anggota legislatif Tionghoa dan beberapa organisasi Tionghoa berperan penting dalam mentransformasikan pemahaman kepada anggota komunitasnya akan pentingnya partisipasi politik etnis Tionghoa dalam perpolitikan di Kota Makassar, sehingga sikap eksklusif dan apatisisme warga etnis Tionghoa terhadap politik dapat dihindarkan. Harus dikau bahwa posisi politik Tionghoa sebanaranya diuntungkan dengan soliditas warga Tionghoa baik yang terhimpun dalam Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) maupun dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Kota Makassar.

Keberadaan organisasi-organisasi di internal etnis Tionghoa juga kelihatan Nampak memberi keuntungan tersendiri khususnya terkait eksistensi mereka ditengah etnis mayoritas. Organisasi-organisasi di internal Tionghoa ini

menjadi jembatan komunikasi antar etnis di luar etnis mereka. Sama halnya ketika tokoh-tokoh Tionghoa masuk dalam dunia politik yang secara tidak langsung membangun hubungan timbal balik antara masyarakat wakilnya di parlemen. Kesadaran politik ini tidak hanya sekedar memanfaatkan momen reformasi yang membuka ruang kebebasan akan tetapi juga ini bagian dari Gerakan mempertegas eksistensi identitas mereka sebagai warga negara yang punya hak sama dengan warga negara lainnya.

Meskipun PITI membawa entitas etnis Tionghoa namun PITI tidak memiliki afiliasi politik secara khusus yang bersifat komando. Orientasi untuk memperjuangkan kepentingan politik tidaklah sebatas sesama etnis Tionghoa seperti hasil wawancara di atas. Secara umum PITI memang memiliki nuansa *chenese* yang kuat dan termasuk keberadaan Masjid Muh. Cheng Hoo. Nama dan arsitektur masjid ini sangat kental dengan kebudayaan Tionghoa. Di Makassar sendiri terdapat satu Masjid Cheng Hoo yang terletak di Tanjung Bunga dan satunya lagi di jalan Hertasning kab. Gowa dekat perbatasan Makassar. Keberadaan masjid-masjid tersebut dianggap bisa membuka ruang-ruang komunikasi antara etnis Tionghoa dengan etnis lokal. Masjid Cheng Hoo sendiri kelihatan sangat efektif tidak hanya untuk di tempatai ibadah shalat 5 (lima) waktu saja akan tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi sosial dan pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut social dan Pendidikan tersebut seperti pesantren tahfidz, pengajian dan diskusi-diskusi yang sifatnya umum. Lingkungan Masjid yang luas dan kondusif membuat kegiatan-kegiatan social dianggap sangat efektif dalam menjalankan aktifitas keagamaan dan Pendidikan serta yang tak kalah pentingnya adalah masyarakat dari berbagai lapisan ikut mengenal. Jadi secara tidak langsung persepektif tentang Tionghoa atau “cina” perlahan-lahan akan diterima dengan baik. Oleh karena itu, dengan kedekatan Islam Tionghoa ini dengan masyarakat lokal sehingga wajar kalau banyak kepentingan politik sering mendekat. Namun demikian perlu

ditekankan PITI tidak berpolitik secara praktis. Terkait hal ini, Eric Horas selaku politisi Tionghoa menyatakan:

“Tentu kita harus menghargai semua pemeluk agama mengingat bahwa tidak ada lagi yang membedakan di dalam kehidupan dan kerukunan kita sehari-hari, kami Apresiasi melihat PITI di Makassar yg begitu sangat terbuka dalam hal komunikasi sosial serta interaksi bagi budaya Tionghoa bersama saudara kita yang beragama muslim. Terkait masalah Pileg baik itu di pilih maupun memilih saya pikir PITI selalu akan terbuka untuk semua calon dan memberikan hak di dalam menentukan pemilihnya (Eric Horas, wawancara, April 2021).

Pernyataan informan di atas tentu sejalan dengan PITI yang secara kelembagaan menegaskan tidak memiliki orientasi politik kepada kelompok manapun namun hal tersebut tidak berlaku secara individu (anggota PITI). Sebagai warga negara mereka tetap memiliki hak untuk berpolitik secara praktis dan mendukung kelompok politik tertentu. PITI tidak memiliki kewenangan untuk membatasi anggotanya maupun tidak pernah mengarahkan atau mendoktri anggota-anggotanya agar memilih kelompok tertentu. PITI menjadi wadah persinggungan yang sangat baik guna membangun kepercayaan satu sama lain sesuai dengan nilai-nilai toleransi.

Organisasi-organisasi di atas tentu punya peranan penting dalam membangun komunikasi yang intens antar warga Tionghoa. Peranan mereka juga dinilai memiliki cukup penting dalam memberi perlindungan serta menjadi jembatan komunikasi ke pemerintah. Selain itu juga keberadaan organisasi-organisasi di atas terbangun sebuah jejaring dengan organisasi keagamaan dalam lingkup etnis Tionghoa seperti Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) mewakili unsur agama Konghucu. Perhimpunan Majelis Agama Buddha Indonesia (Permabudhi). Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). Bahkan keberadaan mereka ini memberi semacam nuansa kebangsaan terhadap eksistensi Tionghoa Indonesia.

Kebaradaan organisasi-organisasi di atas merupakan sebuah pertanda bahwa ini bagian dari upaya penguatan identitas yang dimiliki oleh segenap warga Tionghoa. Eksistensi mereka yang terwadahi dalam sebuah organisasi tetap menjadi alat pemersatu sekaligus alat untuk membangun rasa identitas bersama yakni Tionghoa. Munculnya sentimen yang beredar di masyarakat dengan adanya kecenderungan mengarah pada politik identitas terhadap warga beretnis Tionghoa, seperti pribumi dan non-pribumi sangatlah merugikan warga Tionghoa. Termasuk misalnya ketika berbicara lintas negara, bahwa isu pemerintah yang lebih cenderung berkiblat ke Tiongkok juga menjadi efek yang merugikan etnis Tionghoa di Indonesia. Paradigma politik yang demikian membuat batasan antara 'Tiongkok' sebagai entitas negara yang tentu saja berbeda dengan etnis keturunan Tiongkok yang disebut orang 'Tionghoa Indonesia' menjadi kabur dan semakin tidak berdasar.

Kesimpulan

Dalam bingkai politik multikulturalisme sebenarnya etnis Tionghoa sudah mulai menemukan pola komunikasi baik secara kultural maupun keagamaan. Sehingga, tidak ada lagi batas-batas secara politik yang memisahkan antara etnis Tionghoa dan yang lainnya. Hal ini terlihat ketika adanya warga tionghoa yang aktif di beberapa organisasi baik politik maupun di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Salah satu yang menunjang sehingga keberadaan etnis Tionghoa tetap eksis di tengah mayoritas adalah. Salah satu yang membuat politik multikulturalisme berjalan dengan baik adalah faktor asimilasi dan akulturasi budaya. Tionghoa Islam dianggap sukses menjadi jembatan komunikasi sebagai ruang dialog antar etnis. Pada sisi yang lain kesuksesan ini juga disebabkan karena terdapat beberapa organisasi lintas agama termasuk gerakan-gerakan moderasi beragama yang di motori oleh beberapa ormas termasuk ormas-ormas kepemudaan baik dari dalam maupun dari luar etnis Tionghoa.

Bagaimana pun juga warga Etnis Tionghoa yang berada di Kota Makassar merupakan warga Negara yang mempunyai hak hidup dan berekspresi diberbagai ranah, baik sosial, politik termasuk di bidang ekonomi. Etnis Tionghoa tetap punya peran strategis arah kebijakan pemerintah dengan berpartisipasi aktif dalam politik. Hal ini beriringan dengan era reformasi dimana ruang demokrasi secara nasional dibuka lebar bagi Etnis Tionghoa untuk kemudian secara politik berpartisipasi dengan segala dinamika di dalamnya. Keterlibatan Etnis Tionghoa dipangung politik baik local maupun nasional menyebabkan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Status sebagai politisi secara otomatis membentuk hubungan secara emosional dengan warga pribumi oleh karena posisi keterwakilan masyarakat secara politik di parlemen. Dalam bidang ekonomi di mana Tionghoa cukup mendominasi segmen ini juga punya pengaruh tersendiri di mana hubungan penjual dan pembeli, pemilik usaha dan pekerjanya, secara tidak langsung membangun kedekatan tersendiri antar etnis.

Tionghoa Muslim di Kota Makassar sendiri terlihat mempunyai identitas ganda, di satu sisi mengedepankan status keislamannya yang dekat dengan warga pribumi yang mayoritas Islam dan disisi yang lain tetap mengedepankan ke-Tionghoa-annya. Situasi ini kemudian sulit mengidentifikasi seperti apa identitas mereka yang sebenarnya. Konsep identitas ini tetap memerlukan penelitian lebih lanjut karena masih mempunyai titik kelemahan dari segi konsepnya. Lahirnya kajian-kajian tentang identitas Tionghoa Muslim yang menghasilkan tipologi identitasnya masing membuat kajian ini semakin mempertegas bahwa identitas begitu dinamis dan akan terus berubah seiring dengan waktu berproses.

Factor kultural, agama dan proses asimilasi di dalam masyarakat serta perubahan iklim politik baik nasional maupun lokal secara terus-menerus juga menjadi factor

pengaruh dalam melihat identitas ke-Tionghoa-an. Sebutlah misalnya, bagaimana era reformasi merubah status social Tionghoa, dimensi budaya atau tradisi, serta bidang ekonomi yang mempekerjakan warga pribumi yang membentuk hubungan patron clien. Meskipun demikian, identitas budaya etnis Tionghoa tetap mereka jaga sehingga identitas ketionghoaannya terus terjaga. Termasuk misalnya bagaimana bahasa sehari-hari, aksara yang dipakai, hubungan keluarga yang tetap terjaga, serta acara-acara seperti perkawinan, imlek, kelahiran, serta kematian masih terus terjaga baik dikalangan Islam Tionghoa maupun yang Tionghoa non-muslim.

Daftar Rujukan

- Abdillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis*. indonesiatera.
- Bahrum, Shaifuddin. 2016. *Tenunan Sutra Warisan Budaya Tionggok*. Media Komunikasi Diaspora.
- Baidhhawy, Zakiyuddin. 2001. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikural*. Jakarta: Gelora Aksa Pratama.
- Coppel, Charles. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Pustaka Sinar Harapan.
- Dawis, Aimee. 2010. *Orang Tionghoa Mencari Identitas*. Gramedia.
- Eatwell, Roger, and Anthoni Wright. 2004. *Ideologi Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela.
- Effendy, Muslimin AR. 2000. *Jaringan Perdagangan Keramik Makassar Abad XVI-XVII*. Bina Citra Pustaka.
- Faraidiany, Maghfira. n.d. "Politik Identitas Etnis Tionghoa Di Kota Medan,." *Politeia* 8(2).
- Leo Suryadinata. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Grafity pers.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik; Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Rineka Cipta.

- Nurhayati, Nurhayati, and Aksa Aksa. 2020. "Tionghoa (Muslim) Di Makassar: Studi Atas Pembaurannya Dalam Bidang Budaya Dan Ekonomi Pada Masa Orde Baru." *Yupa: Historical Studies Journal* 4(2):93–102. doi: 10.30872/yupa.v4i2.386.
- Pahlevi, Indra. 2015. *Sistem Pemilu Di Indonesia: Antara Proporsional Dan Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Paskarina, Caroline. 2016. *Merebut Kontrol Atas Kekuasaan*. Yogyakarta: PolGov.
- Pradadimara, Dias. 2014. *Negara Dan Masyarakat Sulawesi Selatan Di Tahun 1950-An*. Kanisius.
- Ramli. 2015. "Dakwah Terhadap Muslim Etnis Tionghoa Di Kota Makassar (Perspektif Sosiologi-Antropologi)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ricklefs, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Serambi Press.
- Said, A. A. Sai. Gataru dan Moh. Dzulkia. 2007. *Sosiologi Politik; Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Pustaka Setia.
- Suryadinata, Leo. 2002. *Negara Dan Etnis Tionghoa*. Jakarta: LP3ES.
- Yusuf Zaenal Abidin. 2016. *Tionghoa, Dakwah & Keindonesiaan*. Mimbar Pustaka.
- Zein, Abdul Baqir. 2000. *Etnis Cina Dalam Potret Pembauran Di Indonesia*. Prestasi Insan Indonesia.

Wawancara

Eric Horas, Politisi Partai Gerindra Kota Makassar

John Adam, Ketua Persatuan Islam Tionghoa Kota Makassar

Erfan, Tokoh pemuda Tionghoa dan ketua Pemuda Khong Hu

Cu